

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN TERPADU DALAM PENINGKATAN KUALITAS CALON GURU

**Oleh: Sugeng Mardiyono
FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta**

Abstract

Considering on the Indonesian Teacher and Lecturer Act, every Indonesian teacher needs to have a teacher certification. Indeed, it is a good opportunity as well as a challenge for every university, which is conducting teacher training program, to have qualified graduates. As a qualified teacher, he must have four competencies concerning pedagogy, attitude, personal, and social. The question that may arise is “How to have such competencies?” Of course, many ways can be done. However, improving the quality of teaching practicum is one of the many possibilities that can be considered. Integrated Student Community Service - Teaching Practicum (KKN-PPL) which is combining community service program and teaching practicum itself has been developed by Yogyakarta State University (UNY) to have a better model of such teaching practicum.

Being a new model, KKN-PPL must be analyzed regularly and continuously to get a better quality of it. In fact, it has been evaluated annually by involving some principals or headmasters, students, lecturers, and the developer team of KKN-PPL. There are many comments, suggestions, criticism, and questions of them that need to be responded. However, the three points such as the main reason for having KKN-PPL, the long time period needed, and the way how to develop it are really good points that need to be clarified. This paper is presented for giving information and answering such questions.

Key words: KKN-PPL, Teaching Practicum, Students Teacher

Pendahuluan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 42 (2003: 28), bahwa setiap pendidik dituntut untuk memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang dipersyaratkan sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, setiap pendidik tersebut harus memiliki beberapa kompetensi yang terkait dengan teori dan praktik pembelajaran. Lebih lanjut, dalam Undang-undang Guru dan Dosen Pasal 8 (DPR-RI, 2005: 5) dinyatakan bahwa sejumlah kompetensi dan sertifikasi tersebut diperoleh dengan melewati proses pendidikan profesi. Untuk itu dalam setiap pendidikan calon guru, termasuk Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), perlu diselenggarakan praktik keguruan yang dikemas dalam Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) untuk mengantisipasi dan mempersiapkan para calon guru agar sukses dalam uji kompetensi guru.

Kenyataan menunjukkan bahwa guru atau calon guru memiliki peran yang dominan dalam pembelajaran. Untuk itu, perlu diusahakan terwujudnya guru dan calon guru, sebagai *the man behind the gun*, yang berkualitas baik dalam bidang penguasaan bidang ilmu, pemahaman peserta didik, metode pembelajaran, maupun sikap dan kepribadian yang luhur. Dalam rangka peningkatan diri, seorang mahasiswa praktikan harus menyadari, mengevaluasi diri, dan memiliki hasrat untuk berubah menjadi lebih baik. Untuk ini, Sumarno Sudarsono (2005: 117) menyatakan bahwa *4 Steps To Wisdom*, yang disusun Anthony de Mello, terdiri atas: (1) mengenali perasaan negatif yang ada pada diri sendiri, (2) jangan anggap itu sebagai suatu kenyataan, (3) jangan samakan diri dengan perasaan itu, dan (4) jangan menginginkan orang lain berubah sebelum diri sendiri berubah, sungguh hal ini sangat relevan untuk direalisasikan bagi para praktikan yang sedang pada tahap perubahan diri. Sungguhpun demikian, kesadaran dan komitmen dari setiap unsur terkait serta kemauan untuk mencapai keberhasilan yang

optimal diperlukan kiat-kiat, teknik, dan strategi khusus.

Berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas guru dan calon guru telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Peningkatan kualitas guru dengan pelatihan, *in service training* sebagaimana yang dilakukan oleh Pusat Penataran Pendidikan Guru (PPPG), peningkatan kualitas guru lewat program Peningkatan Guru Sekolah Menengah (PGSM), baik melalui penyetaraan maupun studi lanjut di dalam negeri ataupun di luar negeri juga telah banyak dilakukan. Tidak ketinggalan, pemantapan program PPL yang merupakan komponen penting dalam penyiapan kualitas calon guru juga menjadi perhatian untuk ditingkatkan kualitasnya.

Di samping itu, keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232/U/2000 dan nomor 045/U/2002 tentang pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan lima komponen kompetensi, yang meliputi *General Life Skill* (GLS) dan *Specific Life Skill* (SLS), sangat besar artinya bagi pengembangan kualitas calon guru. Tawaran program hibah kemitraan LPTK yang diprakarsai oleh Dikti, *website* <http://www//dikti.org.>, dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi (PPTK dan KPT), memuat program peningkatan kualitas PPL yang merupakan salah satu dari 6 program peningkatan kualitas pendidikan. Lebih lanjut, Dikti (Soli Abimanyu, dkk, 2004: 5) telah mengkoordinasikan dan memperkenalkan tujuh LPTK (termasuk UNY) dalam pengembangan model atau cara “baru” PPL untuk dapat dipelajari dan dipertimbangkan pelaksanaannya oleh LPTK lain sesuai dengan kondisi LPTKnya masing-masing.

Model kemasan PPL yang dikembangkan oleh UNY adalah PPL terpadu (disingkat KKN-PPL), yang memadukan (bukan sekedar menggabungkan) antara KKN dan PPL baik dari segi pengelolaan, waktu, program, pendanaan, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), maupun masyarakat sasaran (masyarakat sekolah). Di samping itu, kerjasama sinergis antara Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM), seba-

gai pengelola KKN, dan Unit Praktik Pengalaman Lapangan (UPPL), sebagai pengelola PPL, menunjukkan adanya kesadaran bersama dan budaya kerja sinergis sesuai dengan visi dan misi UNY (Renstra UNY, 2001: 2).

Pada umumnya, kegiatan PPL lebih banyak ditekankan pada peningkatan keterampilan pembelajaran dan administrasi sekolah. Padahal untuk menjadi guru yang profesional tidak cukup hanya dengan bekal kedua hal tersebut. Banyak kompetensi lainnya yang perlu dikuasai, sehingga tuntutan 4 kompetensi keguruan sebagaimana dipersyaratkan baik dalam Undang-Undang Guru dan Dosen maupun Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005) dapat terpenuhi. Untuk itu KKN-PPL, sebagai salah satu bentuk pengembangan PPL, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Permasalahan

Awal munculnya gagasan tentang KKN-PPL ditandai dengan adanya kontroversial pelaksanaan KKN yang terjadi di UNY. Di satu pihak terdapat kelompok yang menghendaki KKN dihilangkan, sementara di pihak lain ada tuntutan yang menginginkan KKN terus dilakukan. Perbedaan pendapat ini berimplikasi terhadap usaha keras universitas untuk dapat mengatasi dan mencari jalan keluarnya. Untuk itu, muncullah beberapa alternatif model KKN termodifikasi yang salah satu diantaranya adalah modifikasi masyarakat sasaran, yang semula hanya di pedesaan selanjutnya dikembangkan juga untuk masyarakat sekolah. Dengan demikian, muncullah pelaksanaan KKN di sekolah (bukan hanya di desa). Padahal, untuk LPTK, kegiatan praktik lapangan juga telah dilakukan di sekolah, yaitu dalam bentuk PPL. Akibatnya terdapat dua jenis kegiatan praktik lapangan yang berbeda tetapi keduanya terjadi di sekolah.

Sehubungan dengan hal ini, wajar jika selanjutnya timbul beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Mengapa dikembangkan KKN-PPL?
- b. Sejauhmana kelayakan alokasi waktu KKN-PPL sesuai dengan bobot sksnya?
- c. Adakah kesesuaian KKN-PPL dengan tuntutan kompetensi guru?
- d. Bagaimanakah eksistensi faktor pendukung dan faktor penghambat KKN-PPL?

Gagasan Pengembangan KKN-PPL

Adanya kontroversial tentang penyelenggaraan KKN yang muncul di UNY pada saat itu berdampak dilakukannya dua penelitian (*independent*) oleh LPM dan UPPL pada tahun 2001 dengan responden para mahasiswa, dosen, pimpinan fakultas/jurusan/ prodi, kepala sekolah, guru, dan kepala dinas pendidikan. Ternyata keduanya menghasilkan kesimpulan yang senada bahwa KKN perlu terus dilaksanakan tetapi dengan modifikasi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa langkah berikutnya untuk menindaklanjuti kesimpulan tersebut adalah peninjauan ulang terhadap masyarakat sasaran KKN, yang semula masyarakat pedesaan, diperluas menjadi masyarakat sekolah. Untuk ini, para mahasiswa dapat menentukan pilihan sesuai dengan keinginannya.

Mengingat sekolah telah menjadi ajang kegiatan PPL, maka semua kegiatan tentang PPL telah tersistematisasikan dengan baik. Dengan demikian, kegiatan KKN dan PPL tersebut diatur sedemikian rupa sehingga satu sama lain tidak saling bertabrakan. Sungguhpun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa benturan dan tabrakan program kegiatan seringkali sulit dihindarkan. Bahkan dapat terjadi, pelaksanaan KKN di sekolah yang dilakukan pada semester tertentu, setelah semester pelaksanaan PPL, kegiatannya hampir tidak berbeda secara signifikan dengan kegiatan PPL yang pernah dilakukan. Guru/ sekolah memberi tugas ulang kepada para mahasiswa pelaksana kegiatan KKN di sekolah

untuk mengajar para siswa di sekolah walaupun kegiatan mengajar tersebut tidak termasuk dalam rencana kegiatan KKN yang harus dilakukan. Dengan demikian terjadi pengulangan kegiatan mengajar yang seharusnya tidak perlu dilakukan pada kegiatan KKN di sekolah tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan program PPL lebih banyak memberikan kesiapan bagi calon guru untuk “berdiri” di depan kelas dan kegiatan lainnya untuk peningkatan keterampilan dalam bidang administrasi dan manajemen sekolah. Padahal, keberhasilan pendidikan, profesionalisme guru dan calon guru, tidak cukup hanya ditentukan oleh “kebolehan” guru dalam mengelola pembelajaran di depan kelas dan keterampilan administrasi serta manajemen sekolah saja tetapi juga faktor lainnya sesuai dengan 4 kompetensi guru. Keterampilan dalam mengelola pelatihan guru bidang studi, pengalaman dalam penyelenggaraan berbagai lomba pendidikan, kemampuan untuk mengelola kegiatan ekstra kurikuler, membina dan mengkoordinasikan asosiasi guru bidang studi, dan menjalin hubungan dengan pihak terkait untuk keberhasilan siswa, semuanya merupakan komponen pendukung profesionalisme keguruan. Di samping itu, melakukan usaha preventif terhadap pengaruh narkoba bagi para siswa, menangani kenakalan siswa, mengatur manajemen dan administrasi pendidikan, serta banyak lagi lainnya, pada umumnya tidak/belum tertuang dalam program kegiatan PPL itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut muncullah ide untuk memadukan kedua program yaitu KKN dan PPL menjadi PPL terpadu (disingkat KKN-PPL) sebagaimana telah di uraikan sebelumnya. Secara konseptual, KKN-PPL ini bukanlah dua kegiatan yang digabungkan, KKN dan PPL dilakukan secara paralel, tetapi pelaksanaan PPL yang lebih profesional yang bahkan diperkuat dengan program KKN yang “bernafaskan” PPL. Dengan demikian program KKN-PPL merupakan perpaduan antara program PPL, yang semakin dimantapkan, dengan program KKN yang penuh dengan muatan keguruan. Kedua program

tersebut tidak saling bertabrakan oleh karena semuanya dikendalikan dalam satuan program, waktu, dana, dan DPL yang sama. Sekiranya akan terjadi benturan program, sejak dini benturan tersebut dapat terdeteksi oleh DPL yang bersangkutan.

Banyak kelebihan program KKN-PPL dibandingkan dengan program KKN dan PPL yang dilakukan secara terpisah. Di samping waktu pelaksanaann dan dana yang diperlukan lebih efisien, ditinjau dari segi jenis pratik lapangan, keduanya merupakan mata kuliah praktik lapangan yang layak untuk dipadukan. Dari segi relevansi (*relevance*), KKN-PPL memiliki relevansi yang sangat tinggi terhadap program peningkatan kualitas calon guru. Hal ini mengingat program PPLnya sendiri tetap ditingkatkan kualitasnya, sementara KKN yang ber“nafas”kan PPL dapat berfungsi sebagai pendukung PPL. Lebih lanjut, dari segi keberlanjutan (*sustainability*) program pengembangan sekolah, KKN-PPL lebih banyak memberi kontribusi positif terhadap pertumbuhan kualitas sekolah dibandingkan KKN di pedesaan. Kerjasama antara sekolah, dinas pendidikan, Pemda, dan LPTK terjadi dan terjalin sangat harmonis baik dalam pengembangan program daerah/sekolah maupun dari sisi pendanaannya. Sungguhpun demikian, beberapa kelemahan masih saja muncul di sana-sini. Untuk ini, perlu terus dilakukan usaha untuk mengatasinya sehingga diperoleh kualitas KKN-PPL yang lebih optimal.

Sesuai dengan hasil evaluasi tahunan terhadap penyelenggaraan KKN-PPL yang melibatkan berbagai pihak terkait seperti sekolah, mahasiswa, DPL, guru pamong, Dinas Pendidikan, Pemda, UPPL dan LPM, bahwa pelaksanaan KKN-PPL dinyatakan memiliki tingkat efisiensi yang cukup membanggakan. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kualitas KKN-PPL seperti: pengelolaan, program, waktu, dana, dan pembimbingan dinyatakan lebih efisien daripada penyelenggaraan KKN dan PPL yang dilakukan secara terpisah. Hal ini sesuai dengan komentar *reviewer* dari Dikti terhadap proposal Sistem Perencanaan, Penyusunan Program, dan Penganggaran (SP4) yang diajukan oleh

UPPL sehubungan dengan program peningkatan kualitas calon guru lewat pengembangan KKN-PPL.

Dua faktor utama yang perlu mendapat perhatian dalam peningkatan kualitas calon guru lewat KKN-PPL tersebut adalah pemberdayaan dan pembudayaan. Faktor pemberdayaan mencakup peningkatan kemampuan dan pengelolaan sumber daya sehingga memiliki relevansi tinggi dengan manajemen dan administrasi yang tangguh. Sedangkan faktor pembudayaan meliputi kemauan, etos kerja, dan keberlanjutan (*sustainability*) program peningkatan kualitas calon guru.

Kelayakan Alokasi Waktu Pelaksanaan

Peningkatan kualitas calon guru lewat KKN-PPL diawali pada Semester 3 dengan cara mahasiswa melakukan kegiatan observasi di sekolah tempat praktik, terutama untuk tugas-tugas perkuliahan kependidikan yang diselenggarakan pada Semester 3 tersebut. Hasil observasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan diskusi dan praktik pengajaran mikro pada Semester 5. Dengan demikian, di samping rekaman pengajaran mikro yang selalu siap di perpustakaan UNY untuk dipelajari sejak Semester 1, kegiatan observasi dan praktik pengajaran mikro merupakan persiapan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan KKN-PPL. Setiap bobot sks KKN-PPL mestinya sama untuk setiap prodi yang menyelenggarakannya tetapi kenyataannya masih bervariasi. Pelaksanaan KKN-PPL dilakukan dalam interval waktu 2 bulan, yaitu Juni dan Juli. Pemilihan interval tersebut ditentukan berdasarkan perhitungan jam yang diperlukan sesuai bobot sks gabungan antara KKN dan PPL.

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan setiap sks mata kuliah, terdiri dari 3 kegiatan yaitu tatap muka, kerja terstruktur, dan kerja mandiri. Sesuai dengan peraturan akademik UNY (2004:7), untuk setiap mata kuliah praktik lapangan satu jam tatap muka setara dengan 4 jam kerja lapangan. Dengan demikian, perhitungan jam pelaksanaan KKN-PPL dengan bobot 6 sks adalah sebagai berikut:

a. Jumlah jam setara dengan jam tatap muka	: $4 \times 6 \times 50 \text{ mnt} = 1200 \text{ mnt.}$
b. Jumlah jam terstruktur	: $1 \times 6 \times 60 \text{ mnt} = 360 \text{ mnt.}$
c. Jumlah jam kerja mandiri	: $1 \times 6 \times 60 \text{ mnt} = 360 \text{ mnt.}$
<hr/>	
Total	= 1920 mnt

Jumlah jam tersebut setara dengan 32 jam/ minggu. Setiap hari diperlukan waktu kerja sekitar 5,5 jam/hari dengan alokasi waktu kerja yang dapat diatur sesuai dengan perkiraan jumlah jam tersebut. Misalnya 3 jam dialokasikan pada pagi hari untuk kegiatan yang terkait langsung dengan siswa dan sekolah. Kegiatan lainnya dapat dilakukan pada sore dan malam hari sekitar 2,5 jam. Dalam praktiknya, pelaksanaan KKN-PPL tersebut jauh lebih besar dari pada alokasi 5,5 jam untuk setiap harinya.

Disadari pula bahwa alokasi waktu tersebut tidak akan memiliki banyak arti jika pemanfaatannya tidak dapat dioptimalkan dengan sebaik-baiknya. Dengan optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan waktu memungkinkan suatu hasil baik dapat diperoleh dengan hanya memerlukan alokasi waktu yang tidak terlalu lama. Untuk ini peran DPL selalu dioptimalkan baik frekuensi kehadiran maupun kualitas bimbingannya. Hal ini dapat dilakukan jika koordinasinya sangat sistemik, kompak, dan sinergis dengan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, tugas tambahan dalam pembinaan KKN-PPL ini adalah meningkatkan kualitas manajemen dan administrasi serta kendali pelaksanaannya. Koordinasi rutin dan berkesinambungan mulai dari penataan administrasi, manajemen, kegiatan pembekalan, penerjunan, bimbingan, penarikan mahasiswa dari lokasi praktik, dan evaluasi program, terus dilakukan dengan mengakomodasikan berbagai kritik, masukan, dan saran yang konstruktif.

Kesesuaian Program KKN-PPL dan Tuntutan Kompetensi Guru

Dalam rangka mencermati kesesuaian program KKN-PPL dan tuntutan kompetensi guru, terdapat dua hal yang dapat dikaji, yaitu: (1) substansi kegiatan KKN-PPL dan kompetensi guru (2) tempat dan pengelolaan KKN-PPL.

a. Substansi Kegiatan KKN-PPL dan Kompetensi Guru.

Pencapaian kualitas KKN-PPL diawali dengan membekali para mahasiswa praktikan tentang berbagai pengetahuan dan keterampilan pembelajaran lewat pengajaran mikro. Dalam Pedoman Pengajaran Mikro UNY (2005:9) dinyatakan bahwa dalam rangka penyiapan calon guru yang profesional terdapat kompetensi dasar mengajar yang perlu dikembangkan. Kompetensi tersebut mencakup keterampilan dasar mengajar dan keterampilan dasar mengajar terpadu.

Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan dalam hal: (1) memulai dan mengakhiri pembelajaran (2) menjelaskan sesuatu (3) *reinforcement* (4) menggunakan media (5) menyusun skenario pembelajaran (6) mengadakan variasi pembelajaran (7) membimbing diskusi (8) mengelola kelas (9) memotivasi bertanya, dan (10) mengevaluasi secara bertahap dan terpisah. Sedangkan untuk keterampilan dasar mengajar terpadu adalah beberapa jenis keterampilan yang dipadukan dan dilakukan dalam waktu pembelajaran tertentu. Di samping itu, beberapa kecakapan hidup dalam pembelajaran juga dilatihkan seperti: kecakapan mengenal diri, kecakapan berpikir, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, tampak adanya kesesuaian program kegiatan KKN-PPL dengan 4 kompetensi guru (pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (2005: 90). Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian

adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Sedangkan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Dengan memperhatikan jabaran keduanya, jika dilakukan pencermatan secara lebih rinci terhadapnya maka tampaknya tidak terlalu sulit untuk menentukan bahwa terdapat kesesuaian diantara keduanya. Di samping itu, dalam skripsinya Menik Rusdianti (2004: 51) dinyatakan bahwa secara umum sistem pengelolaan KKN-PPL telah dikoordinasikan dengan baik oleh LPM dan UPPL. Persiapan dan bimbingan KKN-PPL dalam rangka meningkatkan *life skills*, khususnya untuk mahasiswa jurusan pendidikan Matematika, berjalan dengan baik dan memiliki relevansi terhadap pelaksanaan KKN-PPL.

Sungguhpun demikian, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, kualitas pengelolaan dan pelaksanaan dengan sistem kendali mutu yang memadai sangat menentukan.

b. Tempat dan Pengelolaan KKN-PPL

Pengelolaan KKN-PPL dilakukan di beberapa tempat yang relevan. Kampus, sekolah, Dinas Pendidikan, semuanya dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk penyiapan calon guru agar memiliki kompetensi yang memadai. Kerjasama sinergis antara pengelola LPTK dengan beberapa pihak terkait baik dengan kepala Dinas Pendidikan, kepala sekolah, pimpinan Pemerintah Daerah (Pemda), DPL, guru pamong maupun mahasiswa, semuanya sangat potensial untuk mewujudkan impian tercapainya calon guru yang handal, berdaya saing, dan beradaptasi tinggi.

Adanya pembaharuan pedoman PPL (2003), KKN-PPL (2004), dan KKN-PPL (2005), pengembangan pelaksanaan pengajaran mikro dengan menghadirkan sebagian guru pamong di kampus, sebagai dosen luar biasa, semuanya merupakan usaha untuk mengembangkan KKN-PPL. Di samping itu, UNY telah menyediakan perlengkapan untuk sosialisasi KKN-PPL sedini mungkin lewat rekaman disk pengajaran mikro yang dikoordinasikan oleh UPPL dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI) yang disiapkan di perpustakaan sehingga para mahasiswa dari berbagai program studi dapat memanfaatkannya sedini mungkin. Pelatihan dosen dan guru pamong, peningkatan layanan administrasi KKN-PPL termasuk monitoring pelaksanaannya, semuanya dilakukan secara rutin dan bersambung untuk mendukung terwujudnya calon guru yang berkualitas.

Sungguhpun telah ditunjukkan bahwa ada kelayakan waktu pelaksanaan KKN-PPL, tetapi hal ini tidak berarti bahwa tidak diperlukan lagi usaha penyempurnaan agar menjadi lebih layak. Untuk itu, dengan memperhatikan kritik dan saran yang konstruktif, mulai tahun 2006, interval waktu pelaksanaan KKN-PPL direncanakan akan diubah dari 2 bulan menjadi 2,5 bulan. Alokasi penambahan ini ditentukan atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan KKN-PPL tahun 2005 dan kesepakatan bersama antara DPL dan kepala sekolah, serta masukan lainnya yang perlu dipertimbangkan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, dalam rangka pendidikan profesi dan sertifikasi guru, penyelenggaraan KKN-PPL perlu dilakukan dalam waktu 1 semester penuh. Untuk ini, penyamaan bobot sks KKN-PPL antarprogram studi perlu mendapat perhatian serius agar tidak terjadi variasi dalam pelaksanaannya.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat KKN-PPL

Dalam rangka pengembangan KKN-PPL tidak terlepas dari faktor pendukung yang terdiri dari: (1) peserta program (2) komitmen berbagai pihak, dan faktor penghambat yang terdiri dari: (1) frekuensi kehadiran DPL, dan (2) ketepatan waktu penyelesaian laporan.

a. Faktor Pendukung

- 1) Peserta program: Animo mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN-PPL setiap tahun cenderung naik. Pada tahun 2005, sekitar 70 % dari keseluruhan jumlah mahasiswa KKN cenderung lebih memilih KKN-PPL daripada KKN saja. Pada tahun 2006 telah terdaftar 1968 mahasiswa peserta KKN-PPL. Jumlah yang cukup besar ini merupakan dorongan terhadap pengelola KKN-PPL untuk bekerja lebih keras sehingga KKN-PPL dapat berfungsi sebagai program penyiapan calon guru lebih berkualitas. Keberhasilan Unit Praktik Pengalaman Lapangan (UPPL) dalam meraih dana Program Cakupan Perguruan Tinggi (PCPT), dan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten sangat mendukung keberhasilan program KKN-PPL. Sikap proaktif mahasiswa dalam penentuan tempat KKN-PPL yang sesuai dengan keinginan dan bidangnya, dengan sepengetahuan pengelola, dan perjuangan dalam mendapatkan dana dari para sponsor, hal ini sangat membantu kelancaran program. Perilaku para peserta KKN-PPL yang selalu berusaha bekerja keras, menjaga nama baik universitas, dan menunjukkan kepribadian yang terpuji sehingga mendapat apresiasi masyarakat dan warga tempat praktik sangat mendukung kelancaran pelaksanaan program KKN-PPL.
- 2) Komitmen berbagai Pihak terhadap KKN-PPL: Pengembangan praktik pengalaman lapangan lewat KKN-PPL mencakup 2 kubu utama penyiapan calon guru, yaitu: penguasaan kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuni dan praktik keterampilan pembelajaran termasuk keterampilan lain pendukung profesionalisme calon guru. Untuk ini partisipasi pimpinan universitas, dosen, DPL, pengelola, guru pamong, kepala sekolah, dan karyawan tempat praktik semuanya sangat membantu kelancaran program. Rencana akan dilibatkannya beberapa dosen senior dan bahkan para pimpinan dalam

pengajaran mikro sebagai supervisor kehormatan merupakan daya dukung keberhasilan KKN-PPL. Eksistensi dana inovatif (*block grant* internal) yang dipersiapkan oleh universitas, perbaikan ruang pengajaran mikro yang lebih representatif yang dilengkapi peralatan dan model *one way screen*, diharapkan dapat menambah laju keberhasilan dalam peningkatan kualitas calon guru.

b. Faktor Penghambat

- 1) Kehadiran DPL: Frekuensi kehadiran DPL sangat bervariasi. Tuntutan kehadiran minimal 8 kali selama periode KKN-PPL berlangsung belum semuanya dapat dipenuhi oleh para DPL pada umumnya, walaupun ada juga yang kehadirannya melebihi 8 kali. Hal ini merupakan “pekerjaan rumah” pimpinan dan pengelola untuk mengatasinya.
- 2) Ketepatan waktu penyelesaian laporan: Walaupun jadwal waktu yang ketat untuk pelaksanaan KKN-PPL telah disosialisasikan, termasuk penyelesaian laporan sedemikian rupa sehingga pada waktu mulai kuliah semester berikutnya tidak mengganggu kegiatan penyelesaian laporan KKN-PPL, tetapi dalam praktiknya masih terdapat sejumlah mahasiswa yang tidak dapat menepati jadwal yang telah ditetapkan tersebut. Untuk ini peran DPL dan kerjasama berbagai pihak terkait untuk dapat tepat waktu sangat menentukan keberhasilannya.

Penutup

Dengan memperhatikan berbagai sajian diatas, berikut ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pengembangan KKN-PPL dilakukan akibat keprihatinan mahasiswa dan dosen terhadap pelaksanaan KKN dan PPL secara terpisah. Beberapa pertimbangan yang mendukung lahirnya KKN-

PPL antara lain adanya keyakinan bahwa optimalisasi kualitas calon guru dapat capai dengan menyempurnakan tegaknya PPL itu sendiri yang diperkokoh dengan KKN yang “bernafaskan” PPL secara terpadu.

- b. Dengan menggunakan perhitungan matematis, ternyata waktu yang digunakan untuk KKN-PPL menunjukkan adanya kelayakan, baik kelayakan dalam hal bobot sks KKN-PPL maupun keterlaksanaannya. Sungguhpun demikian, keinginan dari berbagai pihak untuk menambah waktu pelaksanaannya pantas untuk dipertimbangkan pengakomodasiannya.
- c. Terdapat kesesuaian antara KKN-PPL dengan tuntutan kompetensi guru. Pengembangan beberapa kecakapan hidup dalam pembelajaran yang dikembangkan dalam KKN – PPL juga sesuai dengan tuntutan kompetensi guru. Kesesuaian ini perlu dimanfaatkan sehingga kualitas KKN-PPL dapat optimal.
- d. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang keduanya perlu diantisipasi sedemikian rupa sehingga optimalisasi kualitas pelaksanaan KKN-PPL dapat terwujud.

Daftar Pustaka

- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Citra Umbara. Bandung. 2003.
- _____, *Peraturan Akademik UNY Tahun 2004*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. 2004.
- Caruso, D.R. and Salovey, P. 2004. *The Emotionally Intelligent Manager: How to develop and Use the Four Key Emotional Skills of Leadership*. San Francisco. Jossey – Bass A Wiley Imprint.
- DPR RI. 2005. *Rancangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen*.

- Menik Rusdianti. 2004. *Studi Kasus Tentang Peningkatan Kualitas Calon Guru Matematika melalui Program KKN-PPL*. Skripsi S1 Sarjana Pendidikan. FMIPA-UNY. Yogyakarta.
- Soli Abimanyu, dkk. 2004. *Monografi Kumpulan Pelaksanaan PPL di LPTK*. Direktorat PPTK dan KPT, Dikti, Depdiknas. Jakarta.
- Sumarno Sudarsono. 2005. *Hasrat untuk Berubah: The Willingness to Change*. Jakara. PT Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia.